

Transformasi Peran Guru Sebagai Fasilitator Hubungan Sekolah dengan Masyarakat di Era Disrupsi

Abdi Cahya Subekti¹, Zacky Al-Ghofir El-Muhtadi Rizal², Nur Khasanah³

^{1,2,3}Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan ilmu Keguruan,
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

e-mail: abdicahyasubekti123@gmail.com¹, zacky.al-ghofir.el-muhtadi.rizal@mhs.uingusdur.ac.id², nur.khasanah@uingusdur.ac.id³

Abstrak

Era disrupsi yang ditandai oleh kemajuan digital, kebijakan Merdeka Belajar, dan perubahan sosial pasca-pandemi telah mendorong transformasi peran guru dari sekadar penyampai ilmu menjadi fasilitator hubungan antara sekolah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan untuk menganalisis dinamika, faktor pendorong, dan implikasi perubahan tersebut dalam perspektif sosiologi pendidikan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran guru kini berorientasi pada kolaborasi, partisipasi, dan kemitraan lintas pemangku kepentingan, yang didorong oleh kekuatan teknologi, tuntutan sosial, serta kebijakan pendidikan yang menekankan otonomi dan gotong royong. Meskipun menghadapi tantangan seperti beban kerja ganda, kesenjangan digital, dan batas etis interaksi daring, guru berperan sebagai agen perubahan yang membangun kembali relasi sosial pendidikan secara lebih inklusif dan partisipatif. Transformasi ini menegaskan bahwa guru merupakan penggerak utama pendidikan yang berakar pada nilai kemanusiaan, kolaborasi, dan komunitas.

Kata kunci: guru sebagai fasilitator, hubungan sekolah–masyarakat, disrupsi digital, sosiologi pendidikan, Merdeka Belajar

Abstract

The era of disruption, marked by digital advancement, the Merdeka Belajar (Freedom to Learn) policy, and post-pandemic social changes, has transformed the teacher's role from a mere transmitter of knowledge into a facilitator of relationships between schools and communities. This study employs a library research method to analyze the dynamics, driving factors, and implications of this transformation from the perspective of contemporary sociology of education. The findings reveal that teachers' roles are increasingly oriented toward collaboration, participation, and cross-stakeholder partnerships, driven by technological innovation, social demands, and educational policies emphasizing autonomy and collective cooperation. Despite challenges such as increased workload, digital inequality, and ethical boundaries in online interactions, teachers act as agents of change who reconstruct educational social relations in more inclusive and participatory ways. This transformation underscores that teachers are not only adaptive to disruption but also serve as key drivers of education grounded in humanity, collaboration, and community values.

Keywords: teacher as facilitator, school–community relations, digital disruption, sociology of education, Merdeka Belajar.

PENDAHULUAN

Era disrupsi yang ditandai oleh akselerasi digitalisasi, perubahan sosial pasca-pandemi, serta implementasi kebijakan Merdeka Belajar telah membawa implikasi signifikan terhadap sistem pendidikan nasional, khususnya pada transformasi peran guru. Perubahan struktural ini tidak hanya menggeser pendekatan pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga merekonstruksi posisi guru dalam ekosistem pendidikan yang semakin terbuka, dinamis, dan berbasis jejaring sosial (Sofia & Nashrullah, 2025). Guru tidak lagi diposisikan semata sebagai penyampai informasi secara monologis, melainkan sebagai mediator dialogis yang menghubungkan sekolah dengan masyarakat, mengontekstualisasikan pendidikan dalam realitas sosial-budaya lokal, serta mendorong kolaborasi lintas sektor.

Pergeseran paradigmatik dalam peran guru disebabkan oleh perubahan struktural dalam sistem pendidikan nasional selama era disrupsi. Perubahan ini disebabkan oleh digitalisasi, transformasi sosial pasca-pandemi, dan penerapan kebijakan Merdeka Belajar. Guru kini beralih dari peran mereka sebagai penyampai informasi monologis menjadi mediator dialogis yang menghubungkan sekolah dengan masyarakat, mengontekstualisasikan pendidikan dalam konteks sosial-budaya lokal, dan mendorong kerja sama multisector (Sofia & Nashrullah, 2025). Perubahan ini menuntut guru untuk mengembangkan keterampilan inovatif dan adaptif dalam menghadapi tantangan pendidikan yang terus berkembang, terutama dalam konteks digital dan sosial.

Transformasi peran tersebut didorong oleh setidaknya tiga kekuatan utama. Pertama, perkembangan teknologi digital yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan interaksi antara sekolah, peserta didik, orang tua, dan masyarakat secara real-time, sekaligus memperluas ruang sosial pendidikan di luar batas institusional sekolah (Jusman & Parisu, 2025). Kedua, meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik serta kesadaran akan pentingnya pendidikan yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Hastuti, 2023). Ketiga, arah kebijakan pendidikan nasional yang menekankan desentralisasi, otonomi satuan pendidikan, serta pendekatan berbasis komunitas melalui kebijakan Merdeka Belajar, yang secara implisit menempatkan guru sebagai aktor strategis dalam membangun relasi sosial pendidikan (Hastuti, 2023). Dalam konteks ini, guru tidak hanya menjalankan fungsi pedagogis, tetapi juga berperan sebagai aktor sosial yang berinteraksi dengan beragam pemangku kepentingan pendidikan (Wulandari & Suryani, 2022).

Meskipun berbagai kajian telah mengulas perubahan peran guru secara konseptual dan normatif, penelitian yang mengkaji dinamika sosial sehari-hari dari pelaksanaan peran baru tersebut masih relatif terbatas. Khususnya, belum banyak studi yang mengungkap bagaimana interaksi antara norma lokal, infrastruktur digital, dan kerangka kebijakan pendidikan membentuk praktik sosial guru di tingkat akar rumput. Selain itu, aspek relasi kekuasaan, pola partisipasi, serta pemaknaan ulang profesionalisme guru dalam konteks lokal yang beragam belum memperoleh penjelasan yang sistematis. Dengan demikian, kajian tentang peran sosial guru masih cenderung terjebak dalam kerangka kompetensi formal, tanpa menggali dimensi multidimensi dan kontekstual yang melekat pada praktik sosial pendidikan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat dibentuk, dijalankan, dan diperebutkan dalam konteks Indonesia yang ditandai oleh kebijakan pendidikan kontemporer, disrupsi sosial, dan perkembangan teknologi digital. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya perspektif sosiologi pendidikan dengan menempatkan guru sebagai agen perubahan yang berperan strategis dalam membangun relasi sosial pendidikan yang inklusif, kolaboratif, dan berakar pada komunitas.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki, menganalisis, dan mensintesis diskusi akademik dan kebijakan terbaru tentang peran guru yang berubah sebagai hubungan antara sekolah dan masyarakat di era disrupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Penelitian ini tidak bersifat empiris karena tidak mengumpulkan data lapangan; sebaliknya, ia bergantung pada analisis kritis sumber sekunder yang relevan. Fokus utama adalah memahami bagaimana peran guru berubah dalam konteks struktural dan kultural pendidikan Indonesia. Ini mencakup pemahaman tentang pola, dinamika, dan makna sosial.

Sumber data terdiri atas dua kategori. Pertama, sumber primer berupa artikel jurnal ilmiah bereputasi yang terbit antara 2018–2025, diakses melalui basis data Scopus, Sinta, dan Google Scholar. Artikel dipilih berdasarkan relevansi tematik dengan tiga domain: sosiologi pendidikan, kebijakan pendidikan, serta studi identitas dan peran guru. Kedua, sumber sekunder mencakup dokumen kebijakan resmi Kemendikbudristek (seperti panduan Merdeka Belajar dan roadmap digitalisasi sekolah), buku akademik tentang teori sosiologi pendidikan, serta laporan kebijakan dari lembaga internasional (UNESCO, OECD) dan studi komparatif dari negara Asia Tenggara asalkan relevan dengan konteks Indonesia. Sumber non-akademik seperti media massa umum, blog pribadi, dan laporan tanpa peer-review tidak dimasukkan untuk menjaga rigor akademik.

Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris, antara lain: “guru dan masyarakat, peran sosial guru, Merdeka Belajar dan partisipasi, school–community relations, *teacher as mediator*, dan *digital disruption in education*. Strategi ini memastikan cakupan wacana lokal maupun global yang kontekstual.

Analisis data dilakukan melalui sintesis tematik-konseptual. Prosesnya mengikuti alur sebagai berikut: (1) identifikasi konsep kunci dari tiap sumber (misalnya modal sosial, agensi guru, otonomi profesional); (2) pengelompokan konsep menurut tema sentral (misalnya perubahan relasi kekuasaan, bentuk partisipasi masyarakat, tantangan struktural); (3) perbandingan lintas sumber untuk menemukan konsensus, kontradiksi, atau celah wacana; dan (4) integrasi temuan menjadi kerangka analitis koheren yang menjelaskan bagaimana, mengapa, dan dalam kondisi apa peran guru bergeser dari fungsi instruksional ke peran sosial-relasional.

Meskipun penelitian ini berfokus pada konteks Indonesia dengan mempertimbangkan keragaman sosial-budaya, kebijakan Merdeka Belajar, dan tantangan seperti kesenjangan digital referensi global digunakan secara selektif untuk memperkaya perspektif, bukan menggantikan analisis lokal. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang berakar pada realitas nasional, namun terbuka terhadap pelajaran lintas negara. Tujuan akhir metode ini adalah menyusun landasan teoretis yang kokoh, berbasis bukti, dan sensitif terhadap kompleksitas lokal untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang transformasi peran guru dalam ekosistem pendidikan yang terbuka dan kolaboratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transformasi Peran Guru: Dari Otoritas ke Mediator Sosial

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa peran guru di era disrupsi telah bergeser secara mendasar. Guru tidak lagi dipandang sebagai figur otoritatif yang memonopoli transmisi pengetahuan di dalam kelas, melainkan sebagai fasilitator hubungan dinamis antara sekolah dan masyarakat (Suryadarma, 2021). Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigmatis dalam sosiologi pendidikan: dari model pedagogis unidireksional menuju pendekatan yang relasional, partisipatif, dan kontekstual.

Kebijakan Merdeka Belajar memperkuat transformasi ini dengan menempatkan guru sebagai penghubung, mediator, dan penggerak kolaborasi lintas pemangku kepentingan (Suryani & Haryanto, 2022). Implementasi *Profil Pelajar Pancasila* dan *Projek Penguatan Profil* yang menekankan pembelajaran berbasis konteks lokal dan partisipasi komunitas semakin menegaskan bahwa pendidikan bukan lagi tanggung jawab eksklusif sekolah, melainkan proses kolektif yang melibatkan masyarakat (Kemendikbudristek, 2022). Dalam kerangka ini, guru berfungsi sebagai jembatan antara sumber daya sosial-budaya lokal dan tujuan pendidikan formal (Wijaya & Prasetyo, 2023).

Dengan demikian, transformasi peran guru dari figur otoritatif menuju mediator sosial menandai perubahan mendasar dalam lanskap pendidikan kontemporer. Guru tidak lagi beroperasi dalam logika kontrol dan transmisi pengetahuan semata, melainkan dalam kerangka relasional yang menempatkan dialog, kolaborasi, dan konteks sosial sebagai fondasi praktik pendidikan. Kebijakan Merdeka Belajar berperan sebagai katalis yang mempercepat pergeseran ini dengan membuka ruang partisipasi komunitas dan memperluas tanggung jawab sosial guru. Dengan demikian, peran guru sebagai mediator sosial tidak hanya merefleksikan adaptasi terhadap tuntutan zaman, tetapi juga menegaskan reposisi guru sebagai aktor strategis dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, kontekstual, dan berakar pada realitas sosial masyarakat.

B. Pendorong Struktural Perubahan Peran Guru

Literatur menunjukkan bahwa transformasi peran guru didorong oleh tiga kekuatan struktural yang saling terkait. Pertama, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara guru berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Platform seperti WhatsApp, Google Classroom, dan sistem manajemen sekolah memungkinkan komunikasi real-time yang melampaui batas ruang kelas dan jam sekolah, sehingga memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pendidikan (Rahmawati & Nugroho, 2023).

Kedua, perubahan ekspektasi sosial pasca-pandemi turut mendorong pergeseran ini. Masyarakat khususnya orang tua kini menuntut keterbukaan, keterlibatan aktif, dan tanggung jawab bersama dalam proses belajar, bukan sekadar penerima laporan akademik berupa nilai (Putri & Suryadi, 2022). Tuntutan ini mencerminkan pergeseran budaya dari kepercayaan buta terhadap otoritas sekolah menuju kemitraan edukatif yang setara.

Ketiga, kebijakan nasional, khususnya Merdeka Belajar, secara struktural memperkuat peran guru sebagai penggerak kolaborasi. Melalui penguatan otonomi sekolah dan penekanan pada prinsip gotong royong, kebijakan ini mendorong guru untuk secara aktif melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari orang tua hingga tokoh lokal dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran (Kemendikbudristek, 2022).

Dengan demikian, perubahan peran guru tidak dapat dipahami semata sebagai hasil pilihan individual atau inovasi pedagogis personal, melainkan sebagai konsekuensi dari dinamika struktural yang membingkai praktik pendidikan kontemporer. Perkembangan teknologi digital, pergeseran ekspektasi sosial pasca-pandemi, dan arah kebijakan Merdeka Belajar secara simultan membentuk kondisi objektif yang menuntut guru untuk melampaui peran tradisional. Dalam kerangka ini, guru berada pada posisi strategis sekaligus rentan, karena dituntut untuk menegosiasikan tuntutan struktural tersebut dengan kapasitas profesional dan konteks lokal yang beragam. Oleh sebab itu, transformasi peran guru perlu dipahami sebagai proses sosial yang kompleks, yang tidak hanya membuka peluang kolaborasi dan partisipasi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru terkait beban kerja, batas peran, dan keberlanjutan profesionalisme guru.

C. Praktik dan Manifestasi Peran Baru Guru

Dalam praktiknya, tanggapan guru terhadap tuntutan peran yang baru telah melampaui penyesuaian teknis dan telah berkembang menjadi berbagai upaya konkret yang didokumentasikan dalam studi kasus dan laporan kebijakan. Sejumlah guru secara proaktif mengadakan forum online rutin dengan orang tua untuk meningkatkan komunikasi dan keterlibatan keluarga dalam proses belajar. Mereka juga secara proaktif melibatkan tokoh adat, agama, atau budaya lokal dalam pelaksanaan proyek pembelajaran kontekstual. Mereka juga menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye literasi dan berperan sebagai penggerak utama literasi digital di wilayah pedesaan yang tidak memiliki akses teknologi (Aspandi & Muttaqin, 2025) kapasitas guru sebagai aktor sosial yang secara aktif menciptakan ruang partisipasi baru untuk pendidikan khususnya di daerah dengan keterbatasan infrastruktur, di mana peran guru berkembang dari fasilitator pembelajaran menjadi penggerak transformasi komunitas. Program-program ini tidak hanya menunjukkan adaptasi terhadap perubahan struktural, tetapi juga menunjukkan kemampuan guru sebagai aktor sosial yang menciptakan ruang partisipatif baru untuk pendidikan. Hal ini terutama terjadi di daerah dengan keterbatasan infrastruktur, di mana peran guru berkembang dari hanya fasilitator pembelajaran menjadi penggerak transformasi komunitas.

Secara keseluruhan, praktik dan manifestasi peran baru guru menunjukkan bahwa transformasi tersebut tidak berhenti pada tataran wacana kebijakan atau adaptasi teknis semata, melainkan terartikulasikan dalam tindakan sosial yang nyata dan kontekstual. Melalui inisiatif komunikasi partisipatif, pelibatan aktor lokal, serta penguatan literasi digital di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, guru tampil sebagai agen perubahan yang membangun dan memperluas ruang sosial pendidikan. Praktik-praktik ini menegaskan bahwa peran baru guru merupakan hasil negosiasi kreatif antara tuntutan struktural dan realitas lokal, sekaligus memperlihatkan kapasitas profesional guru dalam mentransformasikan pendidikan menjadi proses yang berakar pada komunitas dan berorientasi pada pemberdayaan sosial.

D. Tantangan Struktural dan Etis dalam Peran Baru

Meskipun menjanjikan, transformasi peran guru menghadapi sejumlah hambatan signifikan:

- 1) Beban ganda tanpa dukungan sistemik: Guru diharapkan menjalankan tugas pedagogis sekaligus membangun jaringan komunitas, namun tanpa pengakuan formal, insentif memadai, atau pelatihan profesional (Sari & Wibowo, 2023).
- 2) Kesenjangan digital: Akses teknologi yang tidak merata antara perkotaan dan pedesaan justru berisiko memperlebar jurang partisipasi, terutama di daerah tertinggal (Hermawan & Lestari, 2022).
- 3) Kaburnya batas profesional: Interaksi melalui platform digital mengaburkan batas antara ranah pribadi dan profesional, meningkatkan risiko kelelahan emosional (*emotional burnout*) dan pelanggaran etika (Pratiwi & Setiawan, 2024).

Dengan demikian, transformasi peran guru menuntut kerangka kebijakan dan dukungan sistemik yang tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga melindungi keberlanjutan profesional dan integritas etis guru. Tanpa penguatan regulasi, pemerataan infrastruktur, serta kejelasan batas peran, peran baru guru berisiko bergeser dari peluang pemberdayaan menjadi tekanan struktural yang memperlebar ketimpangan dan melemahkan kualitas relasi sosial pendidikan.

Oleh karena itu, perlu adanya intervensi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan untuk memastikan bahwa perluasan peran guru diimbangi dengan penguatan regulasi, penyediaan dukungan institusional, pemerataan akses

teknologi, serta perlindungan etika profesi. Kebijakan pendidikan hendaknya tidak hanya menuntut adaptasi dan inovasi dari guru, tetapi juga menjamin keberlanjutan peran dan kesejahteraan profesional guru sebagai prasyarat utama bagi terwujudnya pendidikan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

E. Kerangka Teoretis: Guru sebagai Agen Rekonstruksi Sosial

Teori strukturasi Anthony Giddens (1984) memberikan lensa analitis yang kuat untuk memahami dinamika ini. Berbeda dengan pandangan Bourdieu yang melihat guru sebagai agen reproduksi struktur sosial (Wulandari & Suryono, 2023), Giddens menekankan bahwa aktor sosial termasuk guru secara reflektif mereproduksi sekaligus mentransformasi struktur melalui praktik sehari-hari (Prasetya, 2022).

Dalam konteks Indonesia, guru beroperasi di “ruang perbatasan” antara institusi formal sekolah dan kehidupan komunitas lokal (Hakim, 2021). Di ruang inilah makna pendidikan dinegosiasikan ulang, dan praktik pembelajaran disesuaikan dengan nilai lokal sekaligus visi nasional seperti Profil Pelajar Pancasila. Guru bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi agen reflektif yang secara aktif membentuk ulang relasi sosial pendidikan sekaligus menantang dikotomi kaku antara sekolah dan masyarakat.

Dengan demikian, pemahaman guru sebagai agen rekonstruksi sosial menuntut pergeseran orientasi kebijakan pendidikan dari pendekatan administratif-instrumental menuju penguatan kapasitas reflektif dan otonomi profesional guru. Kebijakan pendidikan perlu dirancang untuk memberikan ruang aman bagi guru dalam menegosiasikan praktik pedagogis dengan konteks sosial-budaya lokal, sekaligus memastikan dukungan struktural yang memungkinkan guru menjalankan peran transformatifnya secara berkelanjutan. Tanpa pengakuan normatif terhadap posisi guru sebagai aktor kunci dalam rekonstruksi relasi sosial pendidikan, potensi transformasi yang dihasilkan oleh praktik guru berisiko tereduksi menjadi sekadar implementasi teknokratis kebijakan.

F. Akar Nilai Lokal dan Etika Profesional

Peran guru sebagai penghubung sangat selaras dengan nilai-nilai lokal Indonesia, khususnya:

- 1) Gotong royong dan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan pendidikan (Sudrajat & Fauzi, 2022),
- 2) Konsep Islam seperti amanah (tanggung jawab moral), tawasuth (moderasi), dan khidmah (pelayanan tulus) yang memperkuat legitimasi moral guru sebagai penjaga nilai (Rahman & Huda, 2023).

Dalam kerangka ini, guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menjembatani dimensi epistemologis, etis, dan budaya (Zainuddin & Nurdin, 2021). Akar nilai lokal ini bukan sekadar pelengkap, melainkan sumber daya kultural kritis yang dapat memperkuat ketahanan sosial guru dalam menghadapi tekanan globalisasi dan disrupsi teknologi.

Dengan demikian, penguatan peran guru sebagai penghubung sekolah dan masyarakat perlu berlandaskan pada pengakuan normatif terhadap nilai-nilai lokal dan etika profesional sebagai fondasi kebijakan pendidikan. Prinsip gotong royong, musyawarah, serta nilai-nilai Islam seperti amanah, tawasuth, dan khidmah tidak seharusnya diposisikan sebagai dimensi kultural yang periferal, melainkan diintegrasikan secara sistematis dalam perumusan kebijakan, pengembangan profesional guru, dan standar etika pendidikan. Kebijakan yang mengabaikan akar nilai lokal berisiko melemahkan legitimasi moral guru, sementara kebijakan yang berakar pada nilai tersebut berpotensi memperkuat ketahanan profesional guru dalam merespons tantangan globalisasi dan disrupsi teknologi secara berimbang dan berkelanjutan.

G. Implikasi Kebijakan dan Arah Penelitian Lanjutan

Temuan literatur dalam kajian ini mengindikasikan perlunya sejumlah rekomendasi kebijakan strategis untuk merespons transformasi peran guru dalam konteks pendidikan kontemporer:

- 1) Pengakuan formal terhadap dimensi sosial-komunitas dalam standar kompetensi guru

Pengakuan formal terhadap dimensi sosial-komunitas menuntut perluasan standar kompetensi guru yang selama ini cenderung berfokus pada aspek pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial dalam pengertian yang terbatas. Dimensi sosial-komunitas perlu dirumuskan secara eksplisit sebagai kompetensi strategis yang mencakup kemampuan membangun kemitraan dengan orang tua, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan aktor lokal lainnya. Pengakuan ini penting agar peran guru sebagai mediator sosial dan penggerak kolaborasi memperoleh legitimasi normatif dan institusional, serta tidak dipandang sebagai tugas tambahan yang bersifat sukarela. Dengan demikian, kebijakan standar kompetensi guru tidak hanya mengukur kinerja individual di ruang kelas, tetapi juga kontribusi guru dalam membangun ekosistem pendidikan berbasis komunitas (Suryani, 2020).

- 2) Integrasi literasi digital komunikatif dan keterampilan kemitraan dalam kurikulum LPTK dan pelatihan berkelanjutan

Integrasi literasi digital komunikatif dan keterampilan kemitraan dalam kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) serta program pengembangan profesional berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak di era pendidikan berbasis jejaring. Literasi digital tidak cukup dipahami sebagai kemampuan teknis penggunaan perangkat dan platform, tetapi harus mencakup aspek komunikasi etis, manajemen relasi daring, serta kemampuan membangun dialog konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, keterampilan kemitraan seperti negosiasi, kolaborasi lintas sektor, dan resolusi konflik perlu dilatihkan secara sistematis agar guru mampu mengelola relasi sekolah-masyarakat secara profesional. Kebijakan ini akan memperkuat kesiapan guru dalam menjalankan peran sosialnya secara adaptif tanpa mengorbankan kualitas pedagogik.

- 3) Penyusunan pedoman etis oleh organisasi profesi (seperti PGRI) untuk mengatur interaksi guru-masyarakat di ruang digital.

Penyusunan pedoman etis oleh organisasi profesi, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), menjadi langkah strategis untuk merespons kaburnya batas antara ranah profesional dan personal guru di ruang digital. Pedoman ini diperlukan untuk memberikan rambu-rambu yang jelas terkait etika komunikasi, perlindungan privasi, pengelolaan konflik, serta pencegahan kelelahan emosional akibat interaksi daring yang berlebihan. Keberadaan pedoman etis tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas guru, melainkan untuk melindungi integritas profesi dan keberlanjutan peran sosial guru. Dengan dukungan regulasi etis yang kuat, interaksi guru dengan masyarakat di ruang digital dapat berlangsung secara sehat, profesional, dan selaras dengan nilai-nilai pendidikan (Prasetyo & Hadi, 2021).

Kajian ini bersifat sintetis dan tidak menangkap pengalaman subjektif guru di lapangan. Oleh karena itu, penelitian empiris lanjutan seperti studi etnografi atau pendekatan campuran diperlukan untuk memvalidasi dinamika peran ini dalam konteks keragaman geografis, budaya, dan sosial di Indonesia.

Pergeseran peran guru bukan akhir, melainkan awal dari reposisi pendidikan sebagai gerakan sosial yang inklusif, berakar pada kearifan lokal, dan berkomitmen pada keadilan pendidikan. Dengan struktur ini, pembahasan menjadi lebih fokus, sistematis, dan membedakan dengan jelas antara temuan dari literatur dan analisis/interpretasi penulis. Tabel opsional membantu pembaca menangkap inti temuan secara visual tanpa mengulang narasi panjang.

Secara normatif, implikasi kebijakan dari kajian ini menegaskan bahwa reposisi peran guru sebagai aktor sosial dan penghubung komunitas harus direspons melalui kebijakan yang sistematis, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang. Pengakuan formal terhadap dimensi sosial-komunitas dalam kompetensi guru, penguatan literasi digital komunikatif, serta penyusunan pedoman etika profesi di ruang digital merupakan prasyarat institusional untuk memastikan bahwa transformasi peran guru berlangsung secara berkeadilan dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, keterbatasan kajian berbasis literatur ini menuntut pengembangan agenda penelitian empiris yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap keragaman sosial Indonesia. Dengan demikian, pergeseran peran guru perlu dipahami bukan sebagai tujuan akhir kebijakan pendidikan, melainkan sebagai titik awal rekonstruksi pendidikan nasional sebagai gerakan sosial yang inklusif, berakar pada kearifan lokal, dan berkomitmen pada keadilan pendidikan.

PENUTUP

Simpulan

Bagaimana peran guru berubah di era disrupsi mencerminkan pergeseran paradigmatik dalam sosiologi pendidikan. Sekarang, guru tidak lagi bertindak hanya sebagai orang yang benar di kelas, tetapi menjadi fasilitator hubungan yang berkembang antara sekolah dan masyarakat, bertindak sebagai mediator, penghubung komunitas, dan aktor sosial yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan lokal mereka. Tiga kekuatan utama berkontribusi pada perubahan ini: penyebaran teknologi digital yang membuat lebih banyak orang berinteraksi, lebih banyak orang yang berpartisipasi dan bertanggung jawab atas pendidikan, dan kebijakan nasional melalui Kurikulum Merdeka, yang tekanan desentralisasi, otonomi sekolah, dan pembelajaran berbasis komunitas. Melalui pendekatan ini, guru diharapkan mampu mengembangkan literasi digital, finansial, dan kesehatan, sekaligus memperkuat karakter siswa melalui Projek Profil Pelajar Pancasila yang kontekstual dengan budaya setempat. Terlepas dari kenyataan bahwa perluasan peran guru membuka peluang untuk membangun ekosistem pendidikan yang ramah, bekerja sama, dan berdasarkan nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan musyawarah, masih ada masalah struktural yang perlu diatasi, seperti beban kerja ganda, keterbatasan dalam akses ke teknologi, dan ketidakjelasan tentang batas profesional. Berdasarkan teori strukturasi Giddens, peran baru guru dapat dipahami sebagai proses reflektif di mana mereka tidak hanya mereplikasi struktur sosial pendidikan tetapi juga mengonstruksi ulang hubungan sosial di wilayah perbatasan antara komunitas dan institusi sekolah. Akibatnya, perubahan ini memerlukan kebijakan sistemik yang mengakui dimensi sosial-komunitas dalam kompetensi profesional guru, memasukkan literasi komunikatif digital ke dalam pelatihan, dan menetapkan standar etika untuk interaksi online melalui asosiasi profesi seperti PGRI. Dengan demikian, peran guru akan berubah menjadi kesempatan historis untuk mengubah pendidikan menjadi gerakan sosial yang inklusif, adil, dan berbasis kearifan lokal.

Saran

Untuk memungkinkan transformasi peran guru sebagai fasilitator hubungan antara sekolah dan masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan, pengambil kebijakan, lembaga pendidikan, dan asosiasi profesi guru harus bekerja sama. Standar kompetensi guru nasional harus diperbarui untuk mengakui dimensi sosial dan komunitas sebagai bagian dari profesionalisme guru. Selain itu, guru harus diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan yang mencakup keterampilan lintas sektor, literasi digital, dan pemahaman kontekstual tentang prinsip dan kearifan budaya lokal. Untuk melindungi guru dari risiko kelelahan emosional dan pelanggaran batas profesional, dan untuk mendorong partisipasi masyarakat yang

inklusif dan bermakna, diperlukan pedoman moral yang jelas, terutama saat berinteraksi dengan platform digital. Dengan dukungan yang kuat dari sistem, peningkatan tanggung jawab guru akan menjadi kekuatan kolektif untuk mewujudkan pendidikan yang adil, responsif, dan diterapkan pada realitas sosial-budaya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspandi, A., & Muttaqin, M. (2025). Transforming Teacher Roles in Indonesia's Digital Era: Enhancing Learning Effectiveness and Student Engagement. *Journal of General Education and Humanities*, 4(4), 1495–1510. <https://doi.org/10.58421/gehu.v4i4.616>
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. University of California Press.
- Hakim, L. (2021). Institutional borderlands dalam pendidikan: Peran guru sebagai mediator antara sekolah dan komunitas. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia*, 4(2), 77–91.
- Hastuti, D., & Prasetyo, A. (2023). Transformasi peran guru dalam ekosistem pendidikan pasca-pandemi: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 7(1), 45–60.
- Hermawan, R., & Lestari, D. P. (2022). Ketimpangan partisipasi orang tua dalam pendidikan berbasis digital: Studi kasus di wilayah 3T. *Jurnal Pendidikan Inklusi dan Kebijakan*, 5(2), 89–104.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Panduan pelaksanaan otonomi sekolah dalam kerangka Merdeka Belajar*.
- Kurniawan, R., & Fitriani, Y. (2024). Memperkuat peran sosial guru: Dasar teoretis untuk kebijakan pengembangan profesi di era Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 8(2), 103–118.
- Kurniawan, R., & Fitriani, Y. (2024). Pendidikan sebagai tanggung jawab bersama: Peran guru dalam membangun kemitraan sekolah–masyarakat. *Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia*, 12(1), 78–92.
- Prasetya, A. (2022). Teori strukturasi Giddens dan relevansinya dalam memahami peran guru di era Merdeka Belajar. *Jurnal Filsafat dan Teori Pendidikan*, 6(1), 45–59.
- Pratiwi, A. D., & Setiawan, M. (2024). Etika komunikasi guru–orang tua di ruang digital: Tantangan profesionalisme dalam era Merdeka Belajar. *Jurnal Etika Pendidikan*, 8(1), 33–47.
- Putri, R. A., & Suryadi, E. (2022). Peran orang tua dalam pendidikan pasca-pandemi: Studi partisipasi dan akuntabilitas di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Keluarga dan Masyarakat*, 7(1), 45–60.
- Rahman, A. A., & Huda, M. (2023). Nilai-nilai pendidikan Islam dalam penguatan peran guru sebagai fasilitator komunitas. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 7(1), 55–70.
- Rahmawati, Y., & Nugroho, D. (2023). Integrasi teknologi digital dalam komunikasi sekolah–orang tua: Studi implementasi di sekolah penggerak. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 25(2), 112–126.
- Sari, N. P., & Wibowo, H. (2023). Beban kerja guru dalam implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila: Antara harapan kebijakan dan realitas di lapangan. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 11(1), 112–127.
- Sofia, S., & Nashrullah, M. I. (2025). Persepsi Guru terhadap Tantangan Profesionalisme di Tengah Perubahan Kurikulum. *Alsys*, 5(4), 1256–1273. <https://doi.org/10.58578/alsys.v5i4.6429>

- Sudrajat, A., & Fauzi, I. (2022). Gotong royong dan musyawarah dalam pendidikan berbasis masyarakat: Relevansi nilai lokal dalam kebijakan Merdeka Belajar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(2), 134–148.
- Suryadarma, D. (2021). Transformasi peran guru dalam tata kelola pendidikan berbasis masyarakat di era disrupsi. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia*, 8(2), 145–160.
- Suryani, N. (2021). Dari kelas ke komunitas: Reposisi guru dalam ekosistem pendidikan inklusif. *Jurnal Pendidikan Guru Indonesia*, 9(2), 134–148.
- Suryani, N. (2021). Transformasi peran guru dalam ekosistem pendidikan berbasis komunitas. *Jurnal Ilmu Pendidikan Indonesia*, 9(3), 45–60.
- Suryani, N., & Haryanto, T. (2022). Transformasi peran guru dalam kebijakan Merdeka Belajar: Studi kasus di sekolah penggerak. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(2), 145–158.
- Wijaya, A., & Prasetyo, B. (2023). Kolaborasi sekolah–komunitas dalam membangun Profil Pelajar Pancasila: Tantangan dan strategi implementasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 29(1), 78–92.
- Wulandari, R. (2022). Guru sebagai aktor sosial: Studi tentang peran komunitas dalam pendidikan berbasis lokal. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia*, 6(3), 201–215.
- Wulandari, R., & Prasetyo, A. (2023). Dimensi sosial-profesional guru: Telaah atas kesenjangan antara standar kompetensi dan realitas lapangan. *Jurnal Pendidikan Guru Indonesia*, 11(1), 77–92.
- Wulandari, R., & Suryono, B. (2023). Reproduksi vs. transformasi: Peran guru dalam perspektif teori Bourdieu dan Giddens. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(1), 102–116.
- Zainuddin, M., & Nurdin, S. (2021). Guru sebagai penjaga moral: Peran etis pendidik dalam konteks pendidikan berbasis komunitas. *Jurnal Etika dan Filsafat Pendidikan*, 5(2), 88–102.